



Tingkatkan Pengelolaan Pasar, DPRD Belajar Ke Yogyakarta



GEMA DPRD GROBOGAN

GROBOGAN - Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Grobogan dan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan kunjungan kerja ke Kota Yogyakarta, belum lama ini. Kunjungan itu untuk mempelajari tata kelola pasar di Kota Gudeg tersebut.

Rombongan Komisi B DPRD Kabupaten Grobogan, dipimpin Wakil Ketua Komisi, HM Misbah. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pradana Setiawan dan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Aditya Wahyu Wardana ikut hadir dalam rombongan.

Kunjungan itu dilakukan untuk mengembangkan pasar tradisional dan pasar modern di Kabupaten Grobogan. Selama ini ada anggapan kemunculan pasar atau toko modern, dapat berdampak negatif bagi pelaku usaha skala kecil.

"Kemunculan toko modern ini memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Dampak positif mempermudah akses masyarakat mendapatkan barang-barang untuk kebutuhan sehari-hari. Di sisi lain, kehadirannya juga memengaruhi toko-toko kecil," kata Misbah dalam laporannya.

Dengan memerhatikan persoalan itu, Komisi B DPRD Kabupaten Grobogan berkunjung ke DPRD Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, belum lama ini.

Dalam kunjungan itu, Komisi B Kabupaten Grobogan dan OPD terkait mendapatkan penjelasan tentang kondisi di Yogyakarta.

Di jelaskan, terdapat 33 pasar tradisional dengan kualifikasi kelas I hingga kelas V di Kota Yogyakarta.

Perbedaan itu berdasarkan luas lahan dan fasilitas yang diberikan. Setiap ada perubahan dan penambahan fasilitas juga dilakukan peninjauan kembali.

Pengelolaan pasar tradisional dan modern di Kota Yogyakarta berada di bawah Dinas Pengelolaan Pasar.



SM/dok

Mereka memiliki kewenangan pada bidang pengelolaan pasar. Dari 33 pasar tradisional itu, terdapat lebih dari 15 ribu pedagang.

Mereka memiliki peran vital untuk memfasilitasi dan menjalankan perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Pemerintah Kota Yogyakarta juga mengalokasikan anggaran mencapai Rp 17 milyar pada 2021. Sumber dana itu diperoleh dari retribusi pelayanan pasar yang mencapai Rp 13 milyar pada 2020.

"Ada regulasi atau Perda yang mengatur program pelayanan dan pengelolaan pasar di Yogyakarta. Regulasi itu mengatur secara rinci, mulai dari administrasi, pembinaan, hingga penyediaan sarana prasarana," ujarnya. (zul-42)

SERAHKAN KENANG-KENANGAN :

Wakil Ketua Komisi B DPRD Grobogan Misbah menyerahkan kenang-kenangan kepada perwakilan DPRD Kota Yogyakarta saat kunjungan belum lama ini. (42)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005